



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 080.2/HK.01.01/K.KL-01/10/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra

Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
 - d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/Pp.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perubahan Kedua Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai

1. The first part of the report deals with the general situation of the country.

2. The second part deals with the economic situation of the country.

3. The third part deals with the social situation of the country.

4. The fourth part deals with the political situation of the country.

5. The fifth part deals with the cultural situation of the country.

6. The sixth part deals with the environmental situation of the country.

7. The seventh part deals with the international situation of the country.

8. The eighth part deals with the future prospects of the country.

9. The ninth part deals with the conclusion of the report.

10. The tenth part deals with the annexes of the report.

11. The eleventh part deals with the bibliography of the report.

12. The twelfth part deals with the index of the report.

13. The thirteenth part deals with the list of figures of the report.

14. The fourteenth part deals with the list of tables of the report.

15. The fifteenth part deals with the list of maps of the report.

16. The sixteenth part deals with the list of abbreviations of the report.

17. The seventeenth part deals with the list of symbols of the report.

18. The eighteenth part deals with the list of units of the report.

19. The nineteenth part deals with the list of references of the report.

20. The twentieth part deals with the list of sources of the report.

21. The twenty-first part deals with the list of authors of the report.

22. The twenty-second part deals with the list of titles of the report.

23. The twenty-third part deals with the list of subjects of the report.

24. The twenty-fourth part deals with the list of keywords of the report.

25. The twenty-fifth part deals with the list of terms of the report.

26. The twenty-sixth part deals with the list of definitions of the report.

27. The twenty-seventh part deals with the list of explanations of the report.

28. The twenty-eighth part deals with the list of comments of the report.

29. The twenty-ninth part deals with the list of notes of the report.

30. The thirtieth part deals with the list of footnotes of the report.

31. The thirty-first part deals with the list of appendices of the report.

32. The thirty-second part deals with the list of supplements of the report.

33. The thirty-third part deals with the list of additions of the report.

34. The thirty-fourth part deals with the list of corrections of the report.

35. The thirty-fifth part deals with the list of changes of the report.

36. The thirty-sixth part deals with the list of updates of the report.

37. The thirty-seventh part deals with the list of revisions of the report.

38. The thirty-eighth part deals with the list of amendments of the report.

39. The thirty-ninth part deals with the list of modifications of the report.

40. The fortieth part deals with the list of alterations of the report.

41. The forty-first part deals with the list of improvements of the report.

42. The forty-second part deals with the list of enhancements of the report.

43. The forty-third part deals with the list of upgrades of the report.

44. The forty-fourth part deals with the list of updates of the report.

45. The forty-fifth part deals with the list of changes of the report.

dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan Umum Kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksana tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memberikan pengarahan kepada anggota dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Memberikan bimbingan saran dan arahan teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas yang sedang berjalan supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan ketentuan dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
3. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberi oleh Koordinator.
2. Melaksanakan dan menyampaikan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

KETIGA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulungan Perubahan Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal : 05 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**



DWI SUPRAPTO, S.I.KOM

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the study area. It includes information about the location of the study area, the population of the study area, and the characteristics of the study area. It also discusses the data sources used in the study.

3. The third part of the report is a detailed description of the study results. It includes information about the findings of the study, the conclusions drawn from the findings, and the implications of the findings. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

Prepared by: [Signature]
Date: [Date]
Page: [Page Number]
Total Pages: [Total Pages]

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Kedua Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

Nomor : 080/HK.01.01/K.KL-01/10/2024

Tanggal : 05 Oktober 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan
2	AKBP Rofikoh Yuniarto, S.I.K	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Bulungan
3	Hardijono Sidayat, SH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negri Bulungan
4	Sri Wahyuni, S.H., M.H	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan
5.	Ariyanto Wibowo, SH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bulungan
6	Riswan, S.E	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan
7	Kompol Belnas Pali Padang, S.E., S.I.K	Koordinator	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Bulungan
8	Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy, S.H	Koordinator	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
9	Kristarmaji, Balawa, S.Pd	Anggota	Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bulungan

10	Andi Muhammad Arfah, S.Km	Anggota	Bendahara Bawaslu Kabupaten Bulungan
11	Dermawan, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
12	Asnawiah, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
13	Muh.Ridwan, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
14	Harthanti Aswar, MA	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
15	Muspita Ningsih A, ST	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
16	Ipda Ari Siswoyo, S.E	Anggota	Wakasat Reskrim
17	Ipda Martin Samuel Sibarani S.Tr.K	Anggota	PS. Kasubnit 1 unit 1 Sateskrim
18	Aiptu Hardilan	Anggota	PS. Kasubnit 1 unit 5 Sateskrim
19	Aipda Jusdi	Anggota	PS. Kasubnit 2 unit 3 Sateskrim
20	Brigpol Aris Munandar	Anggota	Banit 3 Subnit 1 Unit 3 Satreskrim
21	Brigpol Hardianto Turnip, S.H	Anggota	Banit 1 Subnit 1 Unit 3 Satreskrim
22	Syahanara Yusti Ramadona, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bulungan
23	Syafawani Nabila Abidin, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulungan
24	Eko Kosasih, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulungan